

BAB IV

UPAYA PENGUATAN DAYA SAING GLOBAL PEMERINTAH

INDONESIA TERHADAP EKSPANSI PASAR CINA PASCA RATIFIKASI

ACFTA

Dalam setiap kesepakatan kerjasama yang telah disepakati, pasti terdapat suatu dampak yang diakibatkan oleh hasil kesepakatan tersebut. Ratifikasi pemerintah untuk bergabung dalam kesepakatan kerjasama perdagangan bebas kawasan antar regional ASEAN dengan Cina memiliki dampak pada ketidakseimbangan neraca perdagangan Indonesia. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari defisit yang dialami Indonesia pasca ratifikasi ACFTA, yang merupakan akibat semakin besarnya arus produk asal Cina yang masuk ke pasar dalam negeri dan akibat dari kalahnya daya saing produk dalam negeri terhadap produk Cina yang cenderung memiliki kualitas lebih bagus dan dengan harga yang lebih murah yang semakin besar beredar di pasar Indonesia. Dengan rendahnya daya saing yang dimiliki oleh produk-produk Indonesia maka diperlukan suatu strategi yang mampu menghadapi serbuan produk-produk asal Cina yaitu dengan melakukan upaya peningkatan terhadap daya saing global

A. Peningkatan Daya Saing Sebagai Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA

Semakin liberalnya perdagangan dunia akan menuntut peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Kemampuan bersaing produk Indonesia harus dipahami keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan komparasi terhadap industri negara-negara lain. Daya saing negara bergantung dari kapasitas industri negara tersebut untuk terus berinovasi dan berkembang. Peningkatan daya saing perlu mendapat perhatian karena punya potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Ketersediaan pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang relatif melimpah semestinya mampu dikembangkan lebih jauh.

Menurut penelitian yang dilakukan *Asia Development Bank (ADB) Institute* (2003), daya saing berarti kemampuan perusahaan untuk bersaing. Perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk menurunkan biaya, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan jaringan pemasaran.⁵⁰ Daya saing produk Indonesia memang perlu mendapat perhatian dan secara sistematis harus ditingkatkan sebagai salah satu cara membangun perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dalam kaitan ini perlu diketahui ukuran daya saing industri Indonesia di pasar internasional sebagai landasan untuk melakukan analisis daya saing dan merumuskan upaya-upaya peningkatan daya saing dalam rangka pembangunan daya saing dan perekonomian nasional.

⁵⁰ *Peningkatan Daya Saing*. Terdapat dalam

http://www.djind.com/ind/Buku%20Kadin_Bab%20V_Peningkatan%20Daya%20Saing.p

Fakta menunjukkan tingkat daya saing Indonesia terhadap negara lain masih rendah yakni menurut *Global Competitiveness Index* (GCI) pada tahun 2008-2009, Indonesia menduduki peringkat ke-54 dari 134 dari survei yang dilakukan oleh *World Economic Forum*. Dalam hal kebebasan berusaha yang ditentukan dalam *Index of Economic Freedom*, untuk tahun 2009 Indonesia menduduki peringkat ke-131 dari 181 negara yang disurvei. Begitu juga dalam hal kemudahan usaha, Indonesia mencapai peringkat 127 dari 181 negara yang disurvei oleh World Bank untuk *Doing Business* tahun 2009.⁵¹ Tingkat daya saing tersebut dapat dinilai dari duabelas aspek, diantaranya institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, tingkat pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan pendidikan dasar, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar modal yang modern, kesiapan teknologi, ukuran pasar, modernitas bisnis, dan inovasi.⁵² Dan jika dibandingkan antara tingkat daya saing Indonesia dengan Cina terdapat perbandingan yang sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:⁵³

⁵¹ *Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas*. Tersedia dalam www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8417/. Diakses tanggal 25 Maret 2011.

⁵² *The Global Competitiveness Report 2009-2010*. Tersedia dalam <https://members.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf/> Diakses tanggal 25 Maret 2011

⁵³ *Indonesia vs China : Studi Komparatif Bisnis Ekonomi dalam CAFTA 2010*. Tersedia dalam

Tabel 4.1

**Indikator Penilaian Perbandingan Daya Saing Global Antara Cina Dengan
Indonesia**

Global Competitiveness Report 2009-2010		
Faktor Kompetitif Bisnis/Ekonomi	Rank. Kompetitif	
		
Faktor Dasar	29	70
Institusi - Pemerintahan	48	58
Infrastruktur	46	84
Stabilitas Makroekonomi	8	52
Kesehatan dan Pendidikan	45	82
Faktor Efisiensi	32	50
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	61	69
Efisiensi Pasar Barang dan Jasa	42	41
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	32	75
Sistem Pasar Finansial	81	61
Kesiapan Teknologi	79	88
Ukuran Pasar	2	16
Faktor Inovasi dan Pemantapan	29	40
Pemantapan Bisnis	38	40
Inovasi	26	39
<i>Data diolah : nusataraku.tk</i>		
<i>Sumber diolah dari GCR 2009-2010</i>		

Melihat fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya diatas, maka dinilai diperlukan adanya strategi untuk mengoptimalkan daya saing global dalam negeri agar mampu ikut bersaing dalam pasar global serta mengantisipasi dampak negatif akibat berlakukannya kesepakatan ACETA

Perkembangan konsep daya saing oleh Cho dan Moon dalam bukunya yang berjudul *Evolution of Competitiveness Theory* (2000) dimulai dari pandangan merkantilisme yang memandang perdagangan sebagai suatu *zero-sum game*, dengan surplus perdagangan sebuah negara diimbangi dengan defisit perdagangan negara lain.⁵⁴

Begitu pula sama halnya kerjasama perdagangan yang berlangsung antara Indonesia dengan Cina pasca ratifikasi ACFTA. Berdasarkan fakta yang terjadi pada hubungan kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia dengan Cina cenderung menguntungkan bagi satu pihak saja yaitu Cina. Sehingga dapat dikatakan bahwa kerjasama yg seharusnya saling menguntungkan belum bisa dicapai secara maksimal. Hal ini dikarenakan karena kurang kompetitifnya produk Indonesia dalam pertarungan kualitas, kuantitas, maupun harga dengan produk Cina yang semakin besar meliputi hampir seluruh sektor pasar domestik Indonesia yang pada akhirnya fenomena ini menjadi penyebab superioritas produk Cina di pasar domestik. Kuota produk Cina dalam jumlah yang besar telah berhasil membanjiri pasar domestik Indonesia. Bahkan realita pasar membuktikan bahwa bagi konsumen dalam negeri, produk asal Cina lebih memiliki daya tarik tersendiri jika dibanding produk dalam negeri. Dimana harga produk Cina yang jauh lebih murah meskipun dari segi kualitas masih dikatakan rendah, telah menarik perhatian konsumen lokal yang dapat dikatakan memiliki daya beli rendah. Sehingga konsumen lokal lebih memilih untuk mengkonsumsi produk

⁵⁴ *Persebaran Daya Saing* Tersedia dalam

asal Cina. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya strategis untuk menghadapi serbuan pasar Cina yang semakin besar masuk ke pasar Indonesia.

B. Upaya – upaya yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Penguatan Daya Saing Global

Pada era globalisasi kerjasama internasional khususnya pada perdagangan bebas merupakan suatu hal yang tidak lagi dapat dihindari oleh negara manapun di dunia ini. Karena didalam kerjasama tersebut terdapat independensi yang tinggi antar negara-negara di dunia, yaitu dengan adanya kepentingan-kepentingan bersama yang ingin dicapai sehingga kerjasama internasional dinilai perlu untuk dibentuk. Sama seperti halnya dengan perjanjian perdagangan bebas lainnya, kesepakatan kerjasama ACFTA juga dibentuk sebagai respon dari hal tersebut. Perdagangan bebas sendiri bukan berarti perdagangan yang dapat dilakukan dengan cara sebebaskan-bebasnya, namun tetap ada peran dan campur tangan dari pemerintah dalam mengatur, member fasilitas, sampai pada strategi-strategi dalam menghadapi perdagangan bebas seperti penguatan pada pasar dalam negeri dan juga pemberian proteksi bagi usaha-usaha domestik dari persaingan produk-produk asing.

Hubungan kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan Cina semakin intens dilakukan pasca bergabungnya Cina kedalam kerjasama perdagangan bebas regional ACFTA. Namun, kerjasama perdagangan yang tengah berlangsung antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Cina dalam ACFTA hanya membuat surplus bagi perdagangan Cina saja dan defisit bagi neraca perdagangan

Indonesia. Defisit yang dialami Indonesia dari tahun ke tahun pasca ratifikasi ACFTA dapat dilihat dari data neraca perdagangan antara Indonesia dengan Cina pada tabel 3.2.

Jika pada tahun sebelumnya neraca perdagangan antara Indonesia dengan mengalami surplus, namun sejak tahun 2007 Indonesia telah mengalami defisit perdagangan sebesar US\$ 210 juta. Defisit tersebut melonjak hampir 15 kali lipat di tahun 2008 menjadi 2,9 milyar. Neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2008 sebesar US\$ -3,6 milyar atau defisit 423,1% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 1,1 milyar.⁵⁵

Dengan pemberlakuan ACFTA hanya akan mendorong semakin tingginya tingkat produk Cina untuk beredar di Indonesia, hal ini disebabkan karena melalui kesepakatan ACFTA, hambatan perdagangan diantara kedua negara akan semakin berkurang. Sehingga hal tersebut memberikan sinyal bahwa persaingan akan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan daya saing dari produk-produk dalam negeri agar mampu bersaing dengan produk-produk asal Cina khususnya.

Oleh karena itu, dalam menghadapi besarnya arus impor yang masuk ke pasar lokal dan kalahnya daya saing produk dalam negeri terhadap barang dari Cina tersebut pasca ratifikasi ACFTA, maka dibutuhkan sebuah strategi dalam menghadapi ekspansi pasar Cina yang semakin meluas dipasar Indonesia. Strategi yang dinilai sangat utama dalam menghadapi kekhawatiran Indonesia terhadap ACFTA yaitu dengan mengupayakan peningkatan terhadap daya saing global.

⁵⁵ *Tinjauan Efektifitas Implementasi Perjanjian ACFTA Bagi Perjanjian Perekonomian Indonesia*, tersedia dalam <http://accountry.blogspot.com/2011/02/tinjauan-efektivitas->

Strategi dalam mengupayakan daya saing global meliputi dua aspek, yaitu isu domestik dan pengawasan pada sektor ekspor dan impor.

1. Strategi Domestik

Setelah pemberlakuan pada kesepakatan ACFTA, ekspansi produk Cina terus semakin besar beredar pada pasar dalam negeri. Barang Cina yang masuk dan beredar ke pasar dalam negeri memiliki harga lebih murah yang menyebabkan barang Cina lebih disukai oleh konsumen dalam negeri. Hal tersebut diatas merupakan akibat dari pengurangan atau penghapusan tarif pada kesepakatan FTA, dengan begitu secara tidak langsung produk dalam negeri harus berhadapan secara langsung dengan produk Cina.

1.1 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat konsumsi masyarakat akan produk Cina tersebut yang notabene memiliki kualitas rendah, maka upaya strategis yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan mutu kualitas produk-produk dalam negeri. Sehingga, jika kualitas dalam negeri lebih baik daripada Cina maka konsumen akan lebih mempertahankan barang yang lebih berkualitas meskipun terdapat selisih perbedaan harga, daripada memilih barang dengan harga murah namun dengan kualitas yang rendah. Selain untuk mampu besaing secara langsung dengan produk Cina, upaya meningkatkan kualitas tersebut juga untuk memberikan kepercayaan pada produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk dari negara-negara lainnya di pasar global. Upaya

Asia Timur. Di kawasan Asia Tenggara, GCI Indonesia jauh dibawah Singapura yang menduduki peringkat ke-3, Malaysia ke-24, Brunai DS ke-32 dan Thailand ke-36. Dan untungnya Indonesia masih diatas Vietnam posisi ke-75, Filipina ke-87, dan Kamboja ke-110. *Catatan : Laos dan Myanmar tidak masuk dalam 133 negara yang disurvei GCR.*⁵⁷

Sehingga untuk mengejar ketertinggal itu pemerintah Indonesia melakukan usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Untuk mendukung program tersebut, pada tahun 2011 pemerintah memberikan anggaran hingga lebih dari 25% dari total anggaran yang sebesar Rp 4,128 triliun untuk mengadakan pelatihan tenaga kerja.⁵⁸ Selain meningkatkan kualitas pelatihan, pemerintah juga menyatakan akan menggalakkan program sertifikasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan melakukan standarisasi kualitas tenaga kerja menggunakan acuan standarisasi internasional. Salah satu program yang akan dikembangkan pemerintah adalah dengan pendirian rumah-rumah terampil di daerah kantong TKI dan memberikan program yang berbasis masyarakat. Dengan tujuan dari pembangunan rumah-rumah terampil adalah agar para tenaga kerja produktif didaerah tersebut tidak harus bekerja keluar negeri sebagai TKI. Fokus dari program peningkatan produktivitas tenaga kerja diprioritaskan pada daerah pedesaan terutama di kantong-kantong TKI.

Bentuk upaya nyata lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing global yaitu dengan menciptakan lapangan kerja

⁵⁷ *Indonesia vs China : Studi Komparatif Bisnis Ekonomi dalam CAFTA 2010*. Tersedia dalam <http://nusantaranews.wordpress.com/2009/12/30/Indonesia-vs-china-studi-komparatif-bisnis-ekonomi-cafta/> Diakses tanggal 27 Maret 2011

⁵⁸ http://www.Indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=13967&Itemid=6

produktif perlu didukung oleh tersedianya tenaga kerja berkualitas tinggi, yaitu tenaga kerja yang berkompoten sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan produktif. Pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu kunci dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas merupakan dalam prioritas nasional penciptaan kesempatan kerja. Salah satu arah pengembangan dan penguatan kompetensi adalah dengan mewujudkan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lembaga pelatihan berbasis kompetensi.⁵⁹ Yang masih merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dimana BLK tersebut terbagi dalam Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar diseluruh Indonesia seperti contoh Balai Latihan Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta (BLK-DIY).⁶⁰

BLK memiliki tujuan pelatihan yakni untuk memberikan pelatihan keterampilan dan keahlian kepada peserta pelatihan diberbagai jurusan yang tersedia, agar setiap lulusan pelatihan dapat mengisi lowongan kerja sesuai kebutuhan pasar dengan kualitas produktivitas yang terlatih dan terampil. Sistem pelatihan dilakukan dengan mengacu pada pola standart latihan kerja kerja dan sistem jam latihan. Jumlah latihan kerja sesuai dengan surat perjanjian penyelenggaraan pelatihan, yaitu 25% teori dan 75% praktek. Pelatihan ini dibiayai oleh pemerintah (dana dikonsentrasikan), dengan lama pelatihan selama 480 jam latihan ditambah magang di perusahaan selama satu sampai dua bulan. Setelah berhasil menyelesaikan pelatihan dan lulus ujian evaluasi akhir, maka

⁵⁹ *Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Melalui BLK*. Tersedia dalam <http://www.bappenas.go.id/node/116/2290/pengembangan-kompetensi-tenaga-kerja-melalui-blk/>. Diakses tanggal 25 Maret 2011

⁶⁰ *BLK DIY*. Tersedia dalam <http://blkuyogya.wordpress.com/2008/11/01/pelatihan-blk-halaj->

peserta akan diberikan sertifikat oleh BLK Yogyakarta.⁶¹ Hal ini merupakan salah satu contoh upaya serius pemerintah dalam meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia.

Jika produktivitas tenaga kerja ditunjukkan sebagai rasio dari jumlah keluaran yang dihasilkan pertotal waktu yang dibutuhkan tenaga kerja, yaitu jam kerja yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.⁶² Maka, jika telah disediakan balai pelatihan tersebut, mampu menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja berkualitas dalam negeri sehingga dapat mengimbangi tingkat kualitas tenaga kerja negara lain. Apabila tenaga kerja yang dimiliki telah berkualitas, maka produk yang dihasilkan nantinya juga akan berkualitas, sehingga mampu bersaing dengan produk asal negara lain, khususnya dengan produk barang asal Cina. Meskipun harga barang yang dihasilkan sedikit lebih mahal, namun jika barang tersebut berkualitas baik maka konsumen dalam negeri akan mempertimbangkan hal tersebut.

1.2 Penerapan Standarisasi Nasional (SNI)

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan satu – satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Tekhnis dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN).⁶³ Untuk mengantisipasi barang konsumsi Cina yang masuk secara secara besar – besaran, maka pemerintah

⁶¹ Ibid. *BLK-DIY*

⁶² *Produktivitas Kerja : Definisi dan Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja*. Tersedia dalam <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/07/produktivitas-kerja-definisi-dan.html>. Diakses tanggal 27 Maret 2011

⁶³ *Teknik SNI*. Tersedia dalam http://www.bsn.go.id/en/about_sni.php. Diakses tanggal 25 Maret

Agar dapat diterima secara luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:⁶⁶

- a. *Openess* (keterbukaan): terbuka bagi semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI
- b. *Transparency* (Transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan ANI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya. Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI
- c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan consensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil
- d. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku
- e. *Coherence*: koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional, dan
- f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan public dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

⁶⁶ *WTO Code of Good Practice for the Preparation, Adoption and Development of Standards*. Diakses tanggal 27 Maret 2014.

Dari kajian BSN yang dilakukan tahun 2006 menunjukkan bahwa para pelaku usaha baru memanfaatkan hanya sekitar 20% dari sekitar 6.800 SNI yang ada. Fakta ini menjadi tantangan bagi BSN untuk meningkatkan sosialisasi penerapan standar kepada pihak berkepentingan, utamanya para pelaku usaha.⁶⁷ Karena mereka belum sepenuhnya memahami hakekat penerapan standar, baik yang bersifat voluntari maupun wajib.

Dengan ketentuan tersebut, tidak terkecuali berlaku pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup berpengaruh dalam sektor perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara agrikultur. Sehingga, hasil pertanian merupakan aset penting yang dapat membawa pemasukan bagi devisa negara. Maka, pembelian produk pertanian yang menggunakan anggaran APBN wajib menggunakan produk-produk yang sudah memenuhi SNI.⁶⁸ Mengacu pada alasan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menilai bahwa sektor industri pertanian merupakan industri strategis yang perlu mendapat perhatian besar dalam konteks kerjasama ekonomi ACFTA. Untuk itu, BSN menetapkan sektor ini sebagai sektor prioritas dalam Gerakan Nasional Penerapan SNI.

Penerapan standar harus dibuktikan dengan sertifikasi. Ada tiga tipe sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu produk sudah Penerapan standar harus dibuktikan dengan sertifikasi. Ada tiga tipe sertifikasi untuk menyatakan bahwa suatu produk sudah memenuhi standar.⁶⁹ Pertama, sertifikasi pihak pertama yang didasarkan pada pernyataan-diri (*self-declaration*) oleh produsen bahwa produk

⁶⁷ Op.cit *Standard dan Daya Saing*. Hal 31

⁶⁸ Op.cit *Sektor Industri Pertanian*. Hal 9

⁶⁹ Op.cit *Standard dan Daya Saing*. Hal 31

yang dipasarkan telah melalui proses produksi yang sistematis dan didokumentasikan. Pernyataan ini tidak didasarkan oleh verifikasi valid dari pihak lain. Ini banyak terjadi di lingkungan produk pertanian atau UKM. Penerapan standar dengan cara ini tidak dianjurkan untuk produk yang memiliki tingkat risiko bahaya yang tinggi.

Kedua, sertifikasi pihak kedua didasarkan pada pernyataan hasil verifikasi yang dilakukan oleh pihak kedua yaitu pembeli atau pelanggan, bahwa produk yang dihasilkan oleh produsen telah memenuhi standar proses produksi yang disepakati dan didokumentasikan. Cara penerapan standar ini hanya memberikan manfaat langsung pada kedua pihak yang terlibat.

Ketiga, sertifikasi pihak ketiga yang dilakukan oleh pihak lain yang terkait dengan prosedural atau penjual atau konsumen. Cara ini disebut *third party certification*. Indonesia juga berupaya menerapkan SNI pada beberapa sektor hasil pertanian Indonesia.

Pada tahun 2007, telah dilakukan uji ulang terhadap 85 SNI dari 117 SNI sektor pertanian yang terkait ACFTA dengan hasil 26 SNI dinyatakan tetap berlaku, 57 SNI perlu direvisi dan 2 SNI diabolisi. Dan pada tahun 2000 ini, BSN telah mengkaji-kaji 32 SNI sektor pertanian dan produk pertanian lainnya. Berdasarkan kaji ulang tersebut, 1 SNI diusulkan diabolisi, yakni: SNI 01-6237-2000 membahas tentang gula merah, tebu, serta SNI lainnya direkomendasikan untuk di revisi.

Penerapan SNI dinilai sangat penting, karena mampu menciptakan standarisasi produk-produk impor yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu,

pemerintah didesak segera menerapkan kebijakan non tarif yang berupa pemberlakuan SNI yang ketat bagi produk-produk impor asal Cina maupun produk Cina yang dibuat didalam negeri serta produk dari negara lainnya. SNI dipandang sebagai bentuk keterpihakan pemerintah terhadap sektor pengamanan pasar domestik karena mampu melindungi industri lokal dan rakyat Indonesia dari barang impor berkualitas rendah. Upaya pada isu domestik dinilai sebagai sektor utama yang perlu untuk ditingkatkan terlebih dahulu, hal ini disebabkan untuk menguatkan sektor-sektor yang menjadi dasar dari untuk melakukan persaingan yang kompetitif. Oleh karena itu hal-hal tersebut diatas sangat perlu untuk dilakukan.

2. Pengawasan Terhadap Ekspor – Impor

Strategi pengawasan di border (perbatasan) yaitu pengawasan yang dilakukan dengan tiga lapis, dimulai dari barang tersebut diekspor oleh negara asal, di *border* (perbatasan), dan di pasar dalam negeri.⁷⁰ Barang masuk maka Indonesia berhak meneliti apakah barang – barang tersebut memiliki dokumen yang sah atau tidak. Jika palsu maka Indonesia berhak menolak dan memberikan hukuman. Apabila ada barang masuk maka bea cukai berwenang melakukan validasi terhadap keaslian dokumen termasuk Surat Keterangan Asal Barang (SKA), yang dapat dilihat yaitu seperti kebenaran pengisian data, tandatangan, jenis kerta, warna dan lainnya.⁷¹

⁷⁰ *Deputi Menko: Barang Impor Lewati Pengawasan Berlapis*. Tersedia dalam <http://www.inilah.com/read/detail/298811/deputi-menko-barang-impor-lewati-pengawasan-berlapis> . Diakses pada tanggal 27 Maret 2011

Merujuk fakta pada defisit neraca perdagangan ekspor-impor antara Indonesia-Cina, lemahnya daya saing produk ekspor Indonesia disebabkan oleh tingginya biaya produksi, yaitu seperti masih tingginya biaya mengurus container di pelabuhan (THC), dimana Indonesia menduduki posisi biaya tertinggi dalam mengurus *shipping*. Biaya pungutan liar minimal sebesar 7,5% dari biaya ekspor, pungutan liar masih banyak ditemui pada jembatan timbang, jalan raya, pelabuhan, dan pelayanan perijinan baik dipusat maupun didaerah. Rendahnya lokal konten dalam proses produksi industri domestik, karena pengusaha domestik masih bergantung pada penggunaan bahan baku yang berkisar antara 28-90%. Masih lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Belum terintegrasinya UMKM dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri skala besar, kurang sehatnya iklim persaingan karena banyak subsektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”.

Melihat derasnya arus ekspor dan impor yang masuk ke pasar dalam negeri, pada lingkup kawasan dibutuhkan strategi untuk mengantisipasi lonjakan arus barang yang masuk, sehingga pemerintah mengupayakan peningkatan dan pengawasan ketentuan ekspor dan impor dalam penerapan ACFTA.

2.1 Upaya Pengawasan Terhadap Ketentuan Impor

Sektor pemerintah yang berpengaruh dalam hal ini adalah bea cukai, oleh karena itu untuk mengatasi barang ilegal yang masuk maka bea cukai mengembangkan Sistem Informasi dan Analisa Perdagangan (SIAP), sementara itu menanggapi besarnya arus impor yang masuk pasca perjanjian ACFTA

dilakukan sistem peringatan dini (*Early Warning System*) untuk mendeteksi jika terjadi lonjakan masuknya barang impor.⁷² Pantauan dini diterapkan berdasarkan pada penggunaan data impor secara online seketika (*realtime*) dari jumlah impor per pos tarif yang menunjukkan jumlah tertentu terhadap batas jumlah impor. Sistem ini akan memberikan informasi secara dini dari impor beberapa pos tarif jika terjadi lonjakan berdasarkan batasan jumlah impor yang telah ditetapkan.⁷³

Jumlah batasan impor dari tiap komoditi, dapat dilihat dari pengalaman historisnya, kemudian beberapa poal dari impor barang tersebut yang bergantung pada kenaikan atau perubahan impor pertahunnya, apakah sesuai dengan kebutuhan normal atau tidak. Apabila berdasarkan sinyal dari sistem pemantauan dini menunjukkan memburuknya kondisi seperti terjadinya lonjakan impor yang berdampak negatif berdasarand terjadi *unfair trade*, maka pemerintah akan mengambil langkah kebijakan berupa kebijakan bea masuk tindakan sementara serta bea masuk anti dumping sementara atau bea masuk imbalan sementara untuk mencegah lonjakan tersebut.

Pasca implementasi ACFTA, terdapat kemungkinan pada lonjakan arus impor, maka pemerintah akan mengupayakan menahan laju impor dari Cina sebesar 15% yaitu dengan cara melakukan *unilateral voluntary export restraint*.⁷⁴ Dengan program ini sebuah negara ke negara lain bisa berlangsung secara sukarela. Pemerintah Indonesia berupaya meminta pemerintah Cina untuk

⁷² Ibid *Deputi Menko: Barang Impor Lewati Pengawasan Berlapis*

⁷³ *Menkeu siapkan sistem pemantau dini ACFTA*. Tersedia dalam <http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/menkeu-siapkan-sistem-pemantau-dini-acfta>. Diakses tanggal 28 Maret 2011

⁷⁴ *Pemerintah Bakal Menahan Laju Impor China 15 %*. Tersedia dalam

melakukan pengurangan ekspor dengan sukarela untuk mau melakukannya. Dalam hal menghadapi implementasi perdagangan bebas Asean-China diharapkan China dapat secara sukarela menurunkan dalam tiga produk yaitu tekstil jadi (*apparel*), alas kaki dan elektronik, permohonan ini tidak akan ada kebijakan imbalan yang di berikan kepada China oleh pemerintah karena bersifat sukarela. Karena dengan adanya pengurangan impor barang mereka ke negara Asean akan meningkatkan harga jual mereka di negara Asean. Selain itu China juga mendapat keuntungan lain yaitu dapat mempertahankan pasar Asean yang cukup besar.

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu dengan melakukan *backward and forward linkage policy* dengan membatasi ekspor bahan baku ke Cina seperti gas, kakao, dan kelapa sawit. Sehingga dengan adanya pembatasan ini, mampu menarik investor Cina ke Indonesia agar membuka industri pengolahan di Indonesia dengan memberi sejumlah insentif. Ini karena setiap permintaan terhadap pengurangan quota kepada sebuah negara sudah pasti ada kompensasi, seperti permintaan pengurangan kuota ekspor Indonesia ke China. Upaya-upaya tersebut diperkuat dengan mengefektifkan Peraturan Menteri Perdagangan No.56/ 2008 yang mengharuskan setiap barang impor yang masuk ke Indonesia harus telah lolos verifikasi Sucofindo, yaitu dalam bentuk hasil verifikasi dapat dicantumkan dalam bentuk sertifikat dalam setiap produk yang masuk.

Pada sektor ekspor Indonesia ke Cina lebih mengandalkan produk primer daripada produk jadi. Produk primer yang menjadi ekspor utama yaitu Crude Palm Oil (CPO), gas, dan batubara. Dengan secara rutin tetap mengekspor produk tersebut justru akan mampu merugikan industri nasional sendiri, karena dengan begitu industri dalam negeri tidak memperoleh faktor input untuk menjalankan produksinya. Dimana produk primer yang diekspor juga nantinya akan menghasilkan beragam produk jadi yang selanjutnya dipasarkan ke Indonesia. Namun, jika ekspor tersebut dibatasi maka Indonesia justru akan kehilangan Cina sebagai pangsa pasarnya. Oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan baru berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yaitu dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan *software* PEB secara *online*. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan PEB ini. PEB diajukan untuk memperoleh respon Persetujuan Ekspor (PE). Barulah kemudian PE digunakan sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean atau kawasan dalam pengawasan bea cukai yang dipersiapkan untuk ekspor. PEB berfungsi untuk mengetahui volume barang yang diekspor.

Sehingga dapat dikatakan bahwa usaha atau strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi ACFTA adalah dengan melakukan strategi peningkatan daya saing global dimana pada upaya tersebut terdapat unsur-unsur yang paling pokok untuk dibenahi yaitu pada upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja, melakukan pengawasan terhadap ketentuan ekspor dan

impor dalam FTA, dan penerapan SNI terutama pada sektor pertanian yang merupakan sektor vital bagi kedua negara.

Strategi-strategi tersebut diharapkan agar pasar dalam negeri Indonesia mampu bersaing dengan industri dari luar, khususnya produk dari Cina. Selain itu, strategi tersebut dilakukan pemerintah Indonesia demi mencapai tujuan dari kepentingan nasionalnya yakni meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi